

**PERAN SOSIAL SEKOLAH ISLAM :
(Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten)**

RINGKASAN TESIS

Diajukan kepada :

**Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Pendidikan**



Oleh :

**Suranta
Q 100 050 313**

**MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

ABSTRAK

Suranta. NIM : Q 100050313. PERAN SOSIAL SEKOLAH ISLAM : (Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten). Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten; 2) peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten; 3) dan peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, ketua komite sekolah, dan orangtua siswa. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data analisis interaktif, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian : 1) Peran sosial sekolah di SMK Muhammadiyah Jatinom, Klaten, memberikan pelayanan pendidikan pada warga sekitar, terutama melalui orangtua yang menyekolahkan anaknya, mendapatkan pelayanan informasi layanan pendidikan, rapat dan undangan rapat pleno komite, dan sebagainya; 2) Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru berupa melibatkan pengurus komite untuk melayani dan menerima pendaftaran peserta didik baru dari masyarakat sekitar sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk membangun dan membina lingkungan sekolah dengan baik; dan 3) Peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu yaitu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembiayaan pendidikan, misalnya keringanan dana pengembangan, keringanan sumbangan pengembangan pendidikan, bantuan dana praktik, dan sebagainya.

Kata kunci : *peran sosial, sekolah, Islam.*

ABSTRACT

Suranta. NIM : Q 100050313. THE ROLE OF SCHOOL SOCIAL MOSLEM : (Study Situs Vocational Muhammadiyah Jatinom Klaten). Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.

Purpose of this research is description : 1) the role of school social in service of information of work plan Vocational Muhammadiyah Jatinom Klaten; 2) the role of school social in acceptance?

receiving service of educative participant Vocational Muhammadiyah Jatinom Klaten has just; 3) and the role of school social in education service for inability parent Vocational Muhammadiyah Jatinom Klaten

This research type is qualitative research. Research approach applies phenomenology. Research subject is headmaster, teacher, school committee chief, and student parent. Data collecting method applies in-depth interview, observation, and documentation. Analysis data analytical technique interactive, authenticity of data applies triangulation technique.

Result of research : 1) The role of school social in Vocational Muhammadiyah Jatinom, Klaten, gives education service at member surrounding, especially through parent who is sending to school its(the child, gets service of information of education service, meeting and meeting invitation pleno committee, etcetera; 2) The role of school social in acceptance? receiving service of educative participant has just in the form of entangling official member of committee to serve and receives registration of educative participant has just from public around as main priority, as a mean to builds and constructs school area carefully; and 3) The Role school social in education service for inability parent that is giving amenity and priority in education defrayal, for example priority of expansion fund, priority of contribution of education expansion, practice grants, etcetera.

Keyword : the role of social, school, moslem

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan urgensi ilmu pengetahuan dan pendidikan di kalangan umat Islam ini tidak muncul secara spontan dan mendadak, namun kesadaran ini merupakan efek dari sebuah proses panjang yang dimulai pada masa awal Islam (masa ke-Rasul-an Muhammad). Pada masa itu Muhammad senantiasa menanamkan kesadaran pada sahabat dan pengikutnya (baca; umat Islam) akan urgensi ilmu dan selalu mendorong umat untuk senantiasa mencari ilmu. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya banyak hadis yang menjelaskan tentang urgensi dan keutamaan (hikmah) ilmu dan orang yang memiliki pengetahuan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sangat termashur disebutkan bahwa Muhammad menyatakan menuntut ilmu merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa kejayaan sepanjang abad pertengahan, di mana peradaban dan kebudayaan Islam berhasil menguasai jazirah Arab, Asia Barat dan Eropa Timur, tidak dapat dilepaskan dari adanya sistem dan paradigma pendidikan yang dilaksanakan pada masa tersebut. Setelah ke-wafat-an Muhammad, para sahabat dan umat Islam secara umum tetap melanjutkan misi ini dengan menanamkan kesadaran akan urgensi ilmu pengetahuan kepada generasi-generasi sesudahnya, sehingga kesadaran ini menjadi sesuatu yang mendarah daging di kalangan umat Islam dan mencapai puncaknya pada abad XI sampai awal abad XIII M.

Namun demikian, seiring dengan kemunduran Islam-terutama setelah kejatuhan Bagdad tahun 1258 M, pendidikan dalam dunia Islam pun ikut mengalami kemunduran. Sehingga, pendidikan tidak lagi mampu menjadi sebuah 'sarana pendewasaan' umat. Dengan kata lain, sebagaimana dinyatakan Fazlur Rahman (dalam Anam, 2003:2), pendidikan menjadi tidak lebih dari sekedar sarana untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai 'lama' (tradisional) dari ancaman 'serangan' gagasan Barat yang dicurigai akan meruntuhkan tradisi Islam, terutama 'standar' moralitas Islam Pendidikan tidak lagi mampu menjadi sebuah proses intelektualisasi yang merekonstruksi paradigma (pola pikir) peserta didik melalui interpretasi secara *continue* dengan berbagai disiplin ilmu sesuai perkembangan jaman

Akibatnya, pendidikan Islam melakukan proses 'isolasi' diri sehingga pendidikan Islam akhirnya termarginalisasi dan 'gagap' terhadap perkembangan pengetahuan maupun teknologi. Melihat fenomena di atas, adanya upaya untuk menemukan kembali semangat (gairah) pendidikan Islam tampaknya diperlukan, Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat kembali dunia ke-pendidikan Islam sehingga kembali mampu survive di tengah masyarakat. Dan sebagai langkah awal untuk menemukan kembali semangat ini, tampaknya dapat dilakukan dengan mencoba melihat 'kilasan' perjalanan pendidikan Islam dari masa awal hingga sekarang.

Pendidikan Islam di Indonesia selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan serius yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah dan kalangan yang berkecimpung di dunia pendidikan. Dewasa ini, pendidikan Islam setidaknya menghadapi empat tantangan pokok. Pertama, konformisme kurikulum dan sumber daya manusia; kedua, implikasi perubahan sosial politik; ketiga, perubahan orientasi; dan keempat, globalisasi. Semua tantangan pendidikan Islam tersebut terkait satu sama lain. (Departemen Agama Republik Indonesia. 2007:2).

Dari uraian tersebut, peneliti menetapkan dan mengajukan judul : “PERAN SOSIAL SEKOLAH ISLAM : (Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten)”.

B. Fokus Penelitian

Setelah mengalami perkembangan di era abad XXI ini, tampak SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten menyesuaikan kondisi dan tuntutan perkembangan zaman, untuk itu, fokus penelitian ini adalah : “Bagaimanakah peran sosial SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten?”. Dari fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus penelitian berikut ini: 1) Bagaimanakah peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten?; 2) Bagaimanakah peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten?; 3) Bagaimanakah peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan tampak SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten secara umum tentang pendidikan Islam.
2. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah ingin mendeskripsikan tentang : a. Peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten; b. Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten; c. Peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja para guru melalui perencanaan yang matang, pembinaan, dan pengembangan. Dengan demikian, diharapkan akan ada peningkatan peran sosial sekolah Islam yang mampu membangun kerjasama sekolah dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka memotivasi diri dan pengembangan diri untuk meningkatkan kerjasama masyarakat dan sekolah sehingga kualitas pendidikan Islam yang diharapkan dapat terwujud.
3. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbang saran kepala sekolah dalam rangka ikut mendukung usaha peningkatan kualitas pendidikan Islam.
4. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian sejenis berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Peran sosial dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang dalam kehidupan masyarakat umum (lingkungan masyarakat).
2. Sekolah Islam adalah suatu lembaga pendidikan formasl yang bernuansa Islami, atau sekolah yang berlandaskan pada tuntutan agama Islam.

II. Kajian Teori

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Islam

Pendidikan adalah merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Artinya jika pendidikan suatu bangsa dapat menghasilkan “*Manusia*“ yang berkwalitas lahir batin. Otomatis bangsa

tersebut akan maju, damai dan tetram. Sebaliknya jika pendidikan suatu bangsa mengalami stagnasi maka bangsa itu akan terbelakang disegala bidang

Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia. Islam memandang bahwa pembiasaan sumberdaya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri, dengan demikian Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumberdaya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman (Nata, 2003; 17)

Dewasa ini Pendidikan Nasional tengah menghadapi isu krusial. Isu yang paling sensitif terkait dengan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, debirokrasi dan perilaku pemimpin pendidikan. Hal tersebut masing sangat kontradiktif dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab II pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dan pada bab III pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Depdiknas, 2003: 20)

Untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diharapkan banyak orang atau masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab sekolah, tetapi merupakan tanggungjawab dari semua pihak termasuk didalamnya orang tua dan dunia usaha sebagai customer internal dan eksternal dari sebuah lembaga pendidikan. Arcaro (2005:38), menyampaikan bahwa terdapat lima karakteristik sekolah yang bermutu yaitu: 1) Fokus pada pelanggan. 2) Keterlibatan total; 3) Pengukuran; 4) Komitmen; 5) Perbaikan berkelanjutan.

Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada tujuan. Poerwanegara (2002: 12) menyampaikan ada enam unsur dasar yang mempengaruhi suatu produk : 1) Manusia 2) Metode 3) Mesin 4) Bahan 5) Ukuran 6) Evaluasi Berkelanjutan

Pemimpin lembaga pendidikan Islam, khususnya di lingkungan pesantren dan madrasah merupakan *motivator, event Organizer*, bahkan penentu arah kebijakan sekolah dan madrasah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut

- a. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif
- b. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

- c. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan
- d. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah

2. Sistem Pendidikan Indonesia

Menurut Surya (2004:2) menyatakan bahwa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengandung sejumlah paradigma baru yang menjadi landasan perwujudan pendidikan nasional. Paradigma tersebut, antara lain : 1) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilandasi dengan prinsip-prinsip berikut ini : a) Secara demokratis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keagamaan, dan budaya bangsa. b) Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna. c) Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. d) Sebagai proses keteladanan membangun kemauan dan kreativitas dalam proses pembelajaran. e) Mengembangkan budaya belajar (baca, tulis, dan hitung) bagi segenap warga masyarakat. f) memberdayakan masyarakat melalui partisipasi dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 2. Demokratisasi dan desentralisasi sebagai semangat yang melandasi penyelenggaraan pendidikan nasional dengan lebih menekankan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam keseluruhan aktivitas penyelenggaraan pendidikan; 2) Peran serta masyarakat sebagai konsekuensi demokratisasi pendidikan nasional maka masyarakat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; 3) Tantangan global, hal ini berimplikasi bahwa pendidikan nasional harus beradaptasi dengan perkembangan global yang menuntut sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam menghadapi persaingan global di segala bidang; 4) Kesetaraan dan keseimbangan, bahwa Undang-undang Sisdiknas yang baru mengandung paradigma dengan menerapkan konsep kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki kesetaraan dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Sedangkan yang dimaksud keseimbangan ialah keseimbangan yang utuh antara unsur-unsur kepribadian yang meliputi aspek intelektual, spiritual, emosional, fisik, sosial, moral, dan kultural.

B. Penelitian Terdahulu

Perubahan orientasi pendidikan Islam sudah menjadi keniscayaan dan tuntutan zaman, terlebih di era globalisasi dewasa ini. Orientasi dari sekedar mendidik mereka untuk memahami ilmu (pengetahuan) agama *an sich* haruslah diubah menjadi paham terhadap ilmu agama sekaligus ilmu sosial, ilmu humaniora dan ilmu alam. Ilmu agama dan “ilmu duniawi” harus konvergen. Sayangnya lembaga pendidikan Islam terlalu lambat menyadari keteringgalan ini. Tokoh pendidikan kita terlalu berpikir konservatif dan masih terjebak pada dikotomi antara pendidikan agama-pendidikan umum. Padahal dikotomi itu justru mematikan kreatifitas. Untunglah, dalam batas tertentu sebagian kecil yang berlatar pendidikan “sekuler” relatif lebih cepat menyadari kejumudan. Tidak heran, dewasa ini di perguruan tinggi umum diajarkan pula ekonomi Islam, sosiologi agama (Islam), psikologi Islam, antropologi agama (Islam) dan lainnya. Pada tahun 1980-an, cendekiawan Soedjatmoko sudah mewanti-wanti bangsa Indonesia memasuki abad 21. Dikatakan, pendidikan menjadi “tumpuan” harapan bangsa Indonesia untuk bersaing di kompetisi global. Ketika negara maju terus melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikan mereka, maka ironis

sekali melihat dunia pendidikan Indonesia tidak banyak melakukan terobosan, sekalipun kecil. Kualitas SDM yang dibutuhkan sejatinya adalah SDM yang punya kualifikasi dan visi global. Secara personal, mantan Rektor Universitas PBB itu mengatakan, SDM masa depan, adalah SDM yang tidak hanya menguasai satu dua disiplin dan keahlian tertentu, melainkan beberapa bidang ilmu dan keahlian sekaligus (Departemen Agama Republik Indonesia. 2007:2).

Menurut Gamage, and Sooksomchitra (2004 : 290) dalam penelitiannya tentang “Decentralisation And School-Based Management In Thailand” mengemukakan bahwa,

“Since the late 1980s, the decentralization and devolution of authority to school level have emerged as a phenomenon in most education systems around the globe. Decentralization in education has occurred with a view to improving student outcomes and the effectiveness of the school systems in both developed and developing countries as well as in Western-style democracies and even in former Soviet block countries. These reforms were the result of the attempts to devolve power and authority from federal, state, district and local education authority (LEA) levels to either advisory or governing bodies comprising principals, teachers, parents, community and, in the case of secondary schools, students. While it is true that calls for reforms exist in most countries, any widespread turnaround in performance or examples of significant success are limited. Louis (1986) suggests that educational reform is difficult, and most of the work has to be done in schools. Real reforms in education require extensive, consistent support, accompanied by in service training and technical assistance for school leaders – enabling them to change management and planning skills, and helping them to deal with the school and classroom implications of reforms”.

Menurut Turnbull (2005: 74) dalam penelitiannya tentang “Evaluating School-Based Management: A Tool For Team Self-Review”, mengemukakan bahwa,

“From the perspective of evaluation, school-management teams primarily are accountable to their constituents – the larger school community. Effective management teams are aware of their constituent needs. Therefore, team effectiveness should be gauged by the degree to which team decisions reflect and/or address constituents’ needs. To this end, the purpose of values inquiry evaluation is to increase team accountability by increasing transparency in team decision-making. If teams are able to articulate the values that drive their decisions and align these articulated values with those of the larger school community, in theory, the teams will be more effective and more accountable. In practice, teams that perceive themselves as effective, competent, and cohesive, concomitantly can be perceived by the larger school community to be ineffective or even in opposition to the needs of their constituents. In such cases, it is likely that goals prescribed by the team either misalign with the expectations of the larger school community or are misunderstood. Such misalignment is the focus of values inquiry evaluation”

Menurut Grauwe (2005: 269) dalam penelitiannya tentang “Improving The Quality Of Education Through School-Based Management: Learning From International Experiences. Review of Education”, mengemukakan bahwa,

“School-based management is being increasingly advocated as a shortcut to more efficient management and quality improvement in education. Research, however, has been unable to prove conclusively such a linkage. Especially in developing countries, concerns remain about the possible detrimental impact of school-based management on school quality; equity among different schools in the same system; the motivation of and relationships between principals and teachers; and financial as well as

administrative transparency. The present study defines school-based management and, in view of its implementation in different world regions, examines some of its advantages and disadvantages. In particular, the author explores the strategies which must accompany school-based management in order to ensure a positive impact on quality. These are found to include (1) guaranteeing that all schools have certain basic resources; (2) developing an effective school-support system; (3) providing schools with kelompok information on their performance and advice on how they might improve; and (4) emphasizing the motivational element in the management work of the school principal”.

Menurut Merrya dan Driessen (2005 :411) dalam penelitiannya tentang “Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure”, mengemukakan bahwa,

“In this paper, we will compare the place of Islamic schools in three countries: the United States, the Netherlands and Belgium. The reasons for the choice of these countries have to do with the interesting differences that emerge in such a comparison. Culturally, there is much to compare between the Netherlands and Belgium owing to their geographical contiguity and political affinities. Both countries are robust welfare states. Catholicism enjoys a strong influence in the Netherlands and Belgium, though it encompasses nearly all social institutions in Belgium, while the Calvinist tradition has historically been dominant in the Netherlands. The Dutch language, as it concerns the Netherlands and the northern half of Belgium (Flanders), enhances the sameness, too. One also finds examples of non-denominational and denominational schools in both countries, with a majority of children attending Catholic schools in Belgium, and either Protestant or Catholic schools in the Netherlands”.

Menurut Zuhdi. (2006:415) dalam penelitiannya tentang “Modernization of Indonesian Islamic Schools’ Curricula, 1945–2003”, mengemukakan bahwa, “When Indonesia proclaimed its independence in 1945, the country did not have a well-established education system. The existing educational institutions could be categorized into two groups: religiously affiliated and non-affiliated schools. As the political system of the country turned out to be secular, despite the fact that a group of Muslims wanted it to be based on religion, the educational authority decided to adopt the non-religious-oriented education as its national system. As a result, the religious schools were left outside the system and maintained their independence from the government. However, this does not mean that the government did not give attention to these schools. Considering that these schools have a religious orientation, their supervision was managed by the Ministry of Religious Affairs (MORA) instead of the Ministry of Education. In fact, the modernization of the curricula of the Islamic schools after independence was also influenced by the government”.

III. Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi pembelajaran. Penelitian fenomenologi merupakan prosedur yang menghasilkan data kualitatif. Pada dasarnya penelitian fenomenologi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Studi fenomenologi didasarkan dari hal yang dikatakan orang untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan kebudayaan kelompok sosial atau sistem yang berhubungan dengan orang tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten yang terletak di Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Sekolah ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

C. Kehadiran Peneliti

Secara operasional, kehadiran peneliti di lapangan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau yang mewakili/ menjabatnya, guru, dan komite sekolah maupun mengumpulkan data sekunder khususnya yang terkait dengan keberadaan peran sosial sekolah Islam dalam menyampaikan informasi program kerja sekolah, informasi akademik, dan informasi pelayanan orangtua kurang mampu yang menyekolahkan anaknya.
2. Sebagai murid, peneliti terjun ke lapangan untuk memperoleh data mengenai peran sekolah Islam dalam menyampaikan informasi program kerja sekolah, informasi akademik, dan informasi pelayanan orangtua kurang mampu yang menyekolahkan anaknya.

D. Data, Sumber Data, dan Nara Sumber

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, hasil wawancara, observasi, hasil analisis dan dokumentasi yang mendukung penelitian ini. Data hasil wawancara diperoleh dari kepala sekolah dan guru. Jenis data dari hasil observasi berupa catatan lapangan tentang manajemen guru dalam pembelajaran inovatif digali secara mendalam.

Sumber data penelitian adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan dengan informan, sedangkan sumber data sekunder berupa hasil studi dokumen yang diperoleh dalam penelitian. Untuk penentuan informan bahwa setelah peneliti melakukan prasurvei sebagai studi pendahuluan, peneliti menetapkan pihak-pihak yang menjadi subjek nara sumber yang terdiri dari *informan*. Untuk keperluan penelitian ini, pemilihan *informan* dilakukan secara *purposive* yaitu berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

Pemilihan *informan* dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka untuk memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, yaitu : kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan guru serta orangtua peserta didik sebagai anggota masyarakat (kelompok sosial di luar sekolah).

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam (*in depth interview*), metode observasi berperan, metode dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Selama Pengumpulan Data
2. Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

G. Keabsahan Data

1. Pengamatan secara terus menerus
2. Triangulasi data
3. Membicarakan dengan orang lain (rekan-rekan sejawat yang banyak mengetahui dan memahami masalah yang diteliti). Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

IV. Hasil Penelitian

A. Temuan Penelitian

1. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Informasi Program Kerja

Dari hasil pengamatan dan pengumpulan informasi yang penulis lakukan di SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten, tentang peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja, peneliti menemukan adanya kerjasama timbal balik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orangtua peserta didik berupa penyampaian informasi program kerja sekolah, misalnya jadwal pembelajaran, program keterampilan atau kecakapan hidup, praktik kerja industri, program ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan kenaikan kelas. Namun demikian, ada sebagian kecil orangtua yang benar-benar tidak memahami dan mengetahuinya, karena keterbatasannya, yaitu buta aksara, merasa minder, dan tidak berani melakukan komunikasi dengan pihak sekolah.

2. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru

Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru selalu melibatkan pengurus komite dan dewan guru untuk duduk bersama-sama menyusun draf rencana, pelaksanaan, dan pelaporannya, sehingga terjalin hubungan kinerja yang terpadu dan saling membantu, namun masih ditemukan kendala berupa keterlambatan kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan peserta didik baru yang waktunya tidak efektif.

3. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Orangtua Tidak Mampu

Peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu selalu diupayakan oleh pihak sekolah, namun karena keterbatasan pihak sekolah dan Yayasan, maka alokasi yang diberikan pihak sekolah kepada orangtua yang tidak mampu jumlahnya masih sangat terbatas, jadi prinsipnya adalah pemerataan dan keadilan sesuai kondisi nyata masing-masing orangtua siswa yang tidak mampu tersebut.

B. Pembahasan

1. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Informasi Program Kerja

Jika masalah peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja itu bisa optimal dan mendapat perhatian yang wajar dari masyarakat, maka apa yang telah ditetapkan dipastikan akan terealisasi dengan baik dan berhasil (efektif dan efisien). Banyak anak putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah mereka. Kecenderungannya, pemerintah kita dewasa ini kesulitan memberikan perhatian kepada masalah pendidikan. Apalagi banyaknya bencana alam dan musibah yang menimpa negeri ini membuat pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang mengatur anggaran keuangannya. Sehingga harus ada yang menjadi korban dan salah satunya anggaran pendidikan.

2. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru

Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru dalam membantu menyelesaikan problem kesadaran masyarakat Indonesia yang belum mencapai tahapan "kesadaran kritis" (*critical consciousness*). Setiap kasus yang terjadi selalu memposisikan masyarakat bawah sebagai pihak yang belum mampu memberikan kontribusi, namun mereka tidak kuasa melawan

keterbatasan itu. Kondisi mereka selalu tertekan, namun tidak kuasa untuk meluapkan seluruh aspirasi karena otoritas program sekolah yang mencoba untuk melibatkan mereka.

3. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Orangtua Tidak Mampu

Di bidang sosial, partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.

Bagi Masyarakat, peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu dengan adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dengan masyarakat maka masyarakat, khususnya orangtua peserta didik tidak mampu memperoleh keringanan biaya pendidikan, seperti SPP, dana pengembangan, dana praktik, dan sebagainya..

C. Teori Hasil Penelitian

1. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Informasi Program Kerja

Peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja antara lain menyampaikan program penerimaan peserta didik baru, pendaftaran ulang, pembayaran seragam, tata tertib sekolah, jadwal pelajaran, agenda kegiatan rapat pleno sekolah, penetapan kisaran pembiayaan pendidikan, dan sebagainya, jika pihak sekolah dalam pengelolaannya benar-benar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan bersama komite dan orangtua, maka pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait. Untuk mencapai hubungan sekolah dengan masyarakat khususnya orangtua peserta didik, maka kedua belah pihak harus mewujudkan kerjasama yang sinergis serta melibatkan pemerintah dan dunia swasta, jika ingin mencapai tujuan pendidikan sekolah khususnya dalam pembahasan dan penetapan rencana anggaran pengembangan pendidikan orangtua dalam pembiayaan pendidikan, orangtua selalu diberikan kesempatan untuk mengangsur sampai tiga kali, sehingga tidak begitu berat, walaupun memang benar-benar tidak mampu dibebaskan dari biaya pengembangan pendidikan.

2. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru

Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan melibatkan pengurus komite sekolah dengan memprioritaskan bina lingkungan masyarakat sekitar sekolah, agar mampu memberikan daya dukung yang tinggi dalam pencapaian tujuan sekolah.

3. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Orangtua Tidak Mampu

Peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu terutama terkait dengan SPP, dana pengembangan, biaya praktik mendapatkan bantuan dan keringanan dari pihak sekolah, namun untuk operasional setiap hari orangtua dalam pembiayaan pendidikan tidak mendapatkan bantuan dari pihak sekolah.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “PERAN SOSIAL SEKOLAH ISLAM : (Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinom Klaten)”, dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Informasi Program Kerja

Peran sosial sekolah di SMK Muhammadiyah Jatinom, Klaten, antara lain memberikan pelayanan pendidikan pada warga sekitar, terutama melalui orangtua yang menyekolahkan anaknya, mendapatkan pelayanan informasi layanan pendidikan, rapat dan undangan rapat pleno komite, dan sebagainya.

2. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru

Peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru berupa melibatkan pengurus komite untuk melayani dan menerima pendaftaran peserta didik baru dari masyarakat sekitar sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk membangun dan membina lingkungan sekolah dengan baik.

3. Peran Sosial Sekolah dalam Pelayanan Pendidikan Bagi Orangtua Tidak Mampu

Peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu yaitu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembiayaan pendidikan, misalnya keringanan dana pengembangan, keringanan SPP, bantuan dana praktik, dan sebagainya.

B. Implikasi

1. Jika ingin peran sosial sekolah dalam pelayanan informasi program kerja berjalan optimal, maka sekolah khususnya melalui kepala sekolah dan komite sekolah harus mampu menciptakan pengelolaan kerjasama pendidikan sekolah yang optimal, memberdayakan pihak-pihak terkait terhadap program dan kepentingan sekolah.
2. Jika ingin peran sosial sekolah dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru dapat berlangsung dengan baik, maka sekolah perlu mengelola kerjasama dengan komite sekolah secara cermat, dengan prioritas pendidikan anak sekitar sekolah, termasuk dalam pengembangan pendidikan orangtua dalam pembiayaan pendidikan, maka sekolah perlu menjembatani kerjasama dengan semua pihak, khususnya orangtua peserta didik.
3. Jika ingin peran sosial sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi orangtua tidak mampu, maka perhatian utama adalah realisasi dana kepada mereka yang berhak secara adil dan merata.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dalam penelitian ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya orangtua peserta didik perlu meningkatkan kesadaran dan keterlibatannya dalam menjembatani kerjasama dengan sekolah secara terpadu dan saling membangun.
2. Bagi sekolah, khususnya kepala sekolah bersama komite sekolah hendaknya mampu menjembatani pengelolaan sumber daya sekolah utamanya dana pendidikan dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat khususnya orangtua peserta didik, agar mampu menciptakan kondisi umpan balik yang mampu mewujudkan pembiayaan pendidikan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. 2003. "Melacak Paradigma Pendidikan Islam" <http://www.wordpress.com>
- Arcaro, Jerome, S. .2005. *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta PT Bina Aksara.
- Arikunto, S. 2007. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta PT Bina Aksara.
- Darmawan, Oki. 2008. "Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Islam". <http://www.wordpress.com>
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. "Tantangan Pendidikan Islam di Indonesia". <http://www.depag.go.id>.
- Depdikbud 2003. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta Direktorat Dikmenum.
- Dharma, A. 2000. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gamage, David T. and Pacharapimon Sooksomchitra. 2004. "Decentralisation And School-Based Management In Thailand". *International Review of Education – Internationale Zeitschrift fu'r Erziehungswissenschaft – Revue Internationale de l'Education* 50: 289–305, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Grauwe, Anton De. 2005. Improving The Quality Of Education Through School-Based Management: Learning From International Experiences. *Review of Education* (2005) 51:269–287. DOI 10.1007/s11159-005-7733-1.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardalis. 1989. *Model Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Merrya, Michael S. and Geert Driessen. 2005. "Islamic Schools in Three Western Countries: Policy and Procedure". *A University of Wisconsin-Madison, USA; bRadboud University Nijmegen, TheNetherlandsuComparative Education Vol. 41, No. 4, November 2005, pp. 411–432*
- Miles dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* .(Terjemahan). Jakarta : Gramedia.
- Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2006. *Metodologi Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abudin. 2003. "Pengelolaan Sekolah Islam di Indonesia". <http://www.duniaguru.com>.
- Poerwanegara, Suryadi. 2002. *Pendidikan Islam dan Perkembangannya di Inonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subadi. Tjipto. 2010. "Fenomenologi. first order understanding dan second order understanding".<http://tjiptosubadi.blogspot.com/> 2010/05/fenomenologi- first-order-understanding.html.
- Surya, Moch. 2004. "Peningkatan Peran Sosial Sekolah Islam". <http://www.duniaguru.com>.
- Turnbull, Barbara. 2005. "Evaluating School-Based Management: A Tool For Team Self-Review". *Int. J. Leadership In Education*, January–March 2005, Vol. 8, No. 1, 73–79.
- Zuhdi, Muhammad. 2006. "Modernization of Indonesian Islamic Schools' Curricula, 1945–2003". *Faculty of Educational Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia. International Journal of Inclusive Education Vol. 10, No. 4–5, July–September 2006, pp. 415–427*ISSN 1360–3116 (print)/ISSN 1464–5173 (online)/06/04/ 50415–13 © 2006 Taylor & Francis DOI: 10.1080/13603110500430765.